



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361  
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10110

Nomor : 552/SEK/01/XII/2011  
Lampiran : Tiga Lembar  
Hal : Penyampaian LAKIP Th. 2011  
dan Dokumen Penetapan Kinerja Th. 2012

Jakarta, 19 Desember 2011

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI  
di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 (dapat di unduh di [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)). Serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Eselon II keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Maka diminta pada setiap Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk membuat sebagai berikut :

1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 (blanko terlampir), menyajikan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing Eselon I dan II seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 di lingkungan Eselon I dan II (blanko terlampir)
4. Bagi Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI, **paling lambat menyampaikan LAKIP tahun 2011, tanggal 28 Februari 2012**. LAKIP tersebut merupakan dasar untuk penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang merupakan lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 baik untuk Eselon I dan II, **paling lambat diterima tanggal 04 Maret 2012**.

6. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2013 Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI, **paling lambat diterima sebelum Pagu Indikatif Tahun 2013 turun.**
7. Apabila masih diperlukan penjelasan-penjelasan dan/atau asistensi dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, LAKIP dan Indikator Kinerja Utama, kiranya dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Badan Pengawasan.

Mengingat batas waktu dan pentingnya untuk dibahas dengan pihak Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar untuk penyusunan LAKIP yang merupakan lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan disampaikan kepada DPR RI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Maka diharapkan LAKIP, Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Rencana Kinerja Tahun 2013 tersebut dapat diserahkan tepat waktu kepada Mahkamah Agung RI melalui Badan Urusan Administrasi Biro Perencanaan dan Organisasi dengan dilampiri *soft copy* dalam bentuk *Compact Disc (CD)*.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 19 Desember 2011

**Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI**



**Drs. H. M. Rum Nessa, SH.,MH**

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Arsip

**LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA  
DITJEN/BADAN (Eselon I) .....**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran

Keterangan:

1. Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja (Ditjen/Eselon I) dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kerja (Sekretaris Mahkamah Agung RI).

- Contoh Surat Pernyataan Penetapan Kinerja

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
DITJEN/BADAN .....**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 20.....**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : .....  
**Jabatan** : Kepala Badan/Dirjen.....

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : .....  
**Jabatan** : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 20... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 20....

**Kepala Badan/Dirjen**

**Sekretaris Mahkamah Agung RI**

.....

.....

**LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA**  
**Sekretaris Badan / Biro (Eselon II) .....**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran

2. Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja (Sekretaris Badan / Kepala Biro) dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kerja (Kepala Badan / Kepala Dirjen).

- Contoh Surat Pernyataan Penetapan Kinerja

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA**  
**Sekretaris Badan / Biro (Eselon II) .....**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 20.....**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : .....  
**Jabatan** : **Sekretaris Badan/Kepala Biro ( Eselon II )** .....

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : .....  
**Jabatan** : **Kepala Badan/Dirjen ( Eselon I )** .....

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 20... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 20....

**Sekretaris Badan/Kepala Biro**

**Kepala Badan/Dirjen**

.....

.....

Pernyataan Penetapan Kinerja dan Matrik Penetapan Kinerja di buat dalam bentuk **landscape**, di buat dalam 1 (satu) dokumen **tidak sebagai lampiran** dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN .....**  
**BADAN/DITJEN : .....**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target

Keterangan:

Matrik Rencana Kinerja Tahunan di buat dalam bentuk **landscape** dan di buat dalam 1 (satu) dokumen **tidak sebagai lampiran** dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).



## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP.3843348,3810350,3457611 FAX 3810361  
TROMOL POS NO.1020 – JAKARTA 10110

---

Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 Jakarta, 19 Desember 2011  
Lampiran : Dua Lembar  
Hal : Penyampaian LAKIP Th. 2011  
dan Dokumen Penetapan Kinerja Th. 2012

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Kepala Pengadilan Militer Utama.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 (dapat di unduh di [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)). Serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing. Maka diminta pada setiap Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk membuat sebagai berikut :

1. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 (blanko terlampir), menyajikan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh pimpinan masing-masing pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2013 di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama (blanko terlampir)
4. Bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, **paling lambat menyampaikan LAKIP tahun 2011, tanggal 28 Februari 2012.**
5. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012, untuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, **paling lambat diterima tanggal 04 Maret 2012.**

6. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, **paling lambat diterima sebelum Pagu Indikatif Tahun 2013 turun.**
7. Apabila masih diperlukan penjelasan-penjelasan dan/atau asistensi dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, LAKIP dan Indikator Kinerja Utama, kiranya dapat menghubungi Badan Urusan Administrasi, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Badan Pengawasan.

Mengingat batas waktu dan pentingnya untuk dibahas dengan pihak Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai dasar untuk penyusunan LAKIP yang merupakan lampiran dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan akan disampaikan kepada DPR RI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Maka diharapkan LAKIP, Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan Rencana Kinerja Tahun 2013 tersebut dapat diserahkan tepat waktu kepada Mahkamah Agung RI melalui Badan Urusan Administrasi Biro Perencanaan dan Organisasi dengan dilampiri *soft copy* dalam bentuk *Compact Disc (CD)*.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Jakarta, 19 Desember 2011

**Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI**



**Drs. H. M. Rum Nessa, SH.,MH**

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI
7. Arsip

**LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN TK. BANDING/TK. PERTAMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran

Keterangan:

1. Pernyataan Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja (Pansek/Katera) dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggung jawab kerja (Ketua /Kepala Pengadilan).
  - Contoh Surat Pernyataan Penetapan Kinerja:

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING /  
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA .....**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 20.....**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : .....  
**Jabatan** : **Pansek Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tingkat Pertama**  
 Selanjutnya disebut **pihak pertama**

**Nama** : .....  
**Jabatan** : **Ketua Pengadilan Tingkat Banding / Pengadilan Tingkat Pertama**  
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 20... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 20....

**Ketua**  
**Pengadilan Tingkat Banding /**  
**Pengadilan Tingkat Pertama**

**Pansek**  
**Pengadilan Tingkat Banding /**  
**Pengadilan Tingkat Pertama**

.....

.....

2. Pernyataan Penetapan Kinerja dan Matrik Penetapan Kinerja di buat dalam bentuk **landscape**, di buat dalam 1 (satu) dokumen **tidak sebagai lampiran** dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**Lampiran. 2**

**MATRIK RENCANA KINERJA TAHUN .....  
PENGADILAN TK. BANDING/TK. PERTAMA : .....**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target

Keterangan:

Matrik Rencana Kinerja Tahunan di buat dalam bentuk **landscape** dan di buat dalam 1 (satu) dokumen **tidak sebagai lampiran** dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)..

# OUTLINE LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang.....	
B. Tugas dan Fungsi .....	
C. Sistematika Penyajian .....	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	
A. Rencana Strategis 2010 - 2014 .....	
1. Visi dan Misi .....	
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok .....	
B. Rencana Kinerja Tahunan 2011 .....	
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011 .....	
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)	
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran-saran .....	
<b>BAB V LAMPIRAN</b>	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2012	
4. Matriks Rencana Strategis 2010 – 2014	
5. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

**NB :**

Untuk Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 dipisahkan dalam dokumen tersendiri